

Tantangan dan Potensi Food Estate dalam meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia

Nazwa Putri Azzahra¹, Ikomatussuniah²

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 1111230134@untirta.ac.id

Tulisan ini berisi opini mengenai tantangan dan potensi program food estate dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Food estate, sebagai upaya ambisius untuk mencapai swasembada pangan, dihadapkan pada berbagai tantangan teknis, sosial, dan ekonomi. Tulisan ini menyoroti kebutuhan akan implementasi yang tepat, transparansi, serta keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, terutama petani lokal. Selain itu, dibahas pula pentingnya memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta diversifikasi tanaman untuk mengurangi kerentanan terhadap penyakit dan perubahan iklim. Meskipun dengan potensi positifnya, seperti meningkatkan ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan harus menjadi fokus agar program ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa literatur.

Sampai saat ini, Indonesia masih dikenal dengan negara agraris yang memiliki masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sektor pertanian memegang peranan yang cukup penting. (Ayun *et al*, 2020). Tetapi, Indonesia juga memiliki 14,5% dari kurang lebih 30 juta orang di Indonesia mengalami kekurangan gizi (BPS Indonesia, 2020b). Angka tersebut dinilai cukup tinggi mengingat bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah krisis pangan.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan krisis pangan tersebut, seperti terbatasnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk kurangnya akses sumber air bersih, perubahan iklim yang dinilai dapat memengaruhi produktivitas di sektor pertanian dan juga berpotensi menyebabkan berbagai jenis bencana alam, dan juga diperburuk akibat pandemi covid-19 sejak tahun 2020. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya

produktivitas pangan, terganggunya akses distribusi pangan, dan kenaikan harga pangan yang pada akhirnya menimbulkan masalah besar yaitu kelaparan yang dapat menyebabkan masalah-masalah baru pada bidang lainnya.

Krisis pangan tersebut, menjadi salah satu tantangan perlu yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, berbagai program dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah *food estate*. Menurut Setyo dan Elly (2018), "Food estate merupakan konsep yang dibuat untuk mengembangkan produktivitas pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang terdiri atas pertanian, perkebunan, serta peternakan di suatu lahan yang berskala luas". Dengan kata lain food estate berfungsi sebagai solusi ketahanan pangan dan sumber lumbung pangan nasional, sehingga dapat menjadikan negara mampu bertahan dari ancaman seperti krisis pangan.

Program food estate ini telah dimulai sejak era pemerintahan suharto, lalu dilaksanakan kembali pada era pemerintahan SBY dan Joko Widodo. Namun, program tersebut pada implementasinya tidak berjalan mulus sehingga dianggap gagal. Di era kepemimpinan Joko Widodo program ini diserahkan di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan (Menhan) yaitu Prabowo Subianto. Dilansir dari BBC News Indonesia, bahwa food estate yang dijalankan Joko Widodo dan Prabowo Subianto terutama di Gunungmas banyak menuai opini kontra dari masyarakat. Dikarenakan hal-hal yang dilakukan pemerintah dinilai sembrono. Hutan yang seharusnya menjadi penghidupan untuk para penduduk setempat dan juga ekosistem para hewan yang tinggal di hutan, kini hanya tersisa menjadi hamparan lahan kosong. Hilangnya daerah resapan air yaitu hutan tersebut, akibat dibabat habis, yang berpotensi menyebabkan banjir. Program food estate perkebunan singkong, nyatanya tidak terimplementasi dengan baik. Banyak pula warga setempat yang memberi tanggapan bahwa tanah yang sebelumnya adalah hutan yang ditanami pohon karet itu merupakan 70% pasir, dengan arti bahwa tanah tersebut tidak cocok untuk ditanami singkong, atau dapat dikatakan kurang atau bahkan tidak subur, karena singkong yang ditanam di lahan tersebut sesuai yang diprogramkan, tidak memiliki hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan.

Menurut opini saya setelah membaca dan memahami lebih dalam perihal isu program food estate, jika dilihat dari hasil program tersebut dan kerugian yang sudah terjadi, ini bisa disebabkan karena implementasi yang tidak berjalan baik, pemerintah

perlu melakukan penelitian yang komprehensif dari segi lahan, dana, petani/tenaga kerja, begitu juga melakukan tinjauan dari program tersebut seperti menimbang antara hasil yang diperoleh dan kerugian dari program yang dilakukan. Para petani juga diberikan pelatihan dan gaji yang sepadan atas apa yang dikerjakan.

Program food estate adalah program yang bagus dan inovatif, jika implementasi yang dilakukan berjalan dengan baik, entah dari sisi pemerintah, petani, dan juga penduduk negara, maka akan menjadi potensi besar untuk ketahanan pangan di sebuah negara. Jika program food estate ini adalah sebuah program yang bagus, tetapi justru banyak yang kontra akan jalannya program ini di Indonesia, dapat dikatakan pastinya ada yang salah pada pengimplementasian programnya, bahkan banyak pihak yang merasa food estate yang dilakukan pemerintah ini lebih menimbulkan kerugian daripada hasil yang diharapkan. Harus ada yang diperbaiki dari implementasi program ini jika ingin diterapkan. Pemerintah harus melakukan penelitian yang lebih matang dengan melihat dari segala sisi dan bidang.

Daftar Pustaka

Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan konversi lahan pertanian di bagian negara agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38-44.

Bbc.com. 15 Maret 2023. Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalteng. Diakses pada 05 April 2024, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>

BPS Indonesia. (2020b). Statistik Indonesia 2020. *In Statistik Indonesia 2020*.

Nasution, M., & Bangun, O. V. (2020). Tantangan Program Food Estate dalam menjaga ketahanan pangan. *Buletin APBN*, 5.

Setyo, P. And Elly, J. 2018. "Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan". *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 147 (1): 2.